



## **MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SOPPENG PADA ERA REFORMASI (Studi Tentang Keterlibatan Kadernya Dalam Politik 1998-2014)**

**Ummy Azvitah Arif**

**Pendidikan Sejarah, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Email: ummyazvitah@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) bagaimana kebijakan politik Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng pada Era Reformasi, (ii) untuk mengetahui keterlibatan kader Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng dalam politik 1998-2014, (iii) untuk mengetahui implikasi keterlibatan kader Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng dalam politik 1998-2014. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, melalui tahapan-tahapan kerja yang meliputi heuristik atau teknik pengumpulan data, kritik yang bertujuan untuk menentukan atau menilai sumber, interpretasi atau menentukan kedudukan fakta sejarah secara proporsional, dan historiografi yang merupakan pengungkapan kisah sejarah dalam bentuk tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng selalu berdasarkan Khittah Muhammadiyah yang tetap berpegang teguh bahwa Muhammadiyah bersikap netral terhadap politik. Muhammadiyah akan tetap berada di jalannya yang bergerak di dalam bidang dakwah dan tadjid di kalangan masyarakat, serta tidak bergerak dalam politik praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik. Bentuk keterlibatan kader Muhammadiyah di politik di Kabupaten Soppeng dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kader Muhammadiyah yang terpilih di legislatif. Dengan adanya kader-kader Muhammadiyah di lembaga legislatif daerah Soppeng, masyarakat mengharapkan agar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat semakin maju. Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam politik di kabupaten Soppeng memang memberikan pengaruh dalam tubuh organisasi itu sendiri, hubungan Muhammadiyah dan pemerintahan saling mendukung dalam merealisasikan program-program Muhammadiyah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kata Kunci: Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng pada Era Reformasi

## **Abstrack**

The study aims at examining (i) the political policy of Muhammadiyah in Soppeng district in reformation era, (ii) the involvement of Muhammadiyah caders in Soppeng district in politics of 1998-2014, (iii) the implication of the involvement of Muhammadiyah caders in Soppeng district in politics of 1998-2014. The study employed historical method conducted in several stages included heuristics or data collecting technique, critic which aimed at determining or assessing the sources, interpreting or determining the facts of history proportionally, and historiography which revealed the stories of history in written form.

The result of the study revealed that the political policy of Muhammadiyah in Soppeng district wased always based on Muhammadiyah Khittah that it was still adhering to be neutral towards politics Muhammadiyah. Muhammadiyah would still be in missionary endeavor (dakwah) and *tadjud* for the people and did not get involve in practical politics in power domain as political parties. The forms of involvement of Muhammadiyah cadres in politics in Soppeng district was proven by several Muhammadiyah cadres were elected as legislature. With the position of Muhammadiyah cadres in legislative body in Soppeng, the people expected the service of government would progress towards ihe people. The involvement of Muhammadiyah cadres in politics in Soppeng district was indeed gave influence in the organization itself, the relationship of Muhammadiyah and the government supported each other in making into realization of Muhammadiyah programs and the government's policy in Soppeng district.

Keyword : *Muhammadiyah in Soppeng district in reformation era*

## PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan bangsa Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M atau bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. Dari awal didirikannya, Muhammadiyah telah menetapkan dakwahnya yang senantiasa berorientasi kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam rangkaian mencapai cita-cita mulia agar terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Mulksam, 1990: 27)

Muhammadiyah dalam perjuangannya, memegang teguh cita-cita K.H. Ahmad Dahlan yaitu membentuk gerakan perjuangan nasional dan pembaharuan. Cita-cita itu tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyatakan bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah, hidup manusia bermasyarakat, mamatuhi ajaran-ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammadiyah mengajak dan memelopori umat Islam untuk berpikir dinamis dan kreatif dalam memahami dan mengaktualisasikan Islam di tengah kehidupan modern, tanpa terlepas dari acuan Al Qur'an dan Hadits (Nashir, 2000: 2).

Dalam perjalanannya, hubungan Muhammadiyah dengan negara sangat menarik. Meskipun Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, bukan sebagai organisasi politik. Namun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah berkepentingan dengan politik untuk mendukung dan melancarkan gerakan dakwahnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan politik,

Muhammadiyah selalu berhati-hati dan bersikap lentur, dengan tetap menjaga komitmen untuk mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain amal usaha Muhammadiyah juga berkiprah dalam kehidupan politik.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik sama sekali bukan hal yang baru. Secara kelembagaan bisa jadi tidak memperlihatkan wajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa terlibat dalam politik. Terbukanya pintu politik memungkinkan secara organisatoris terlibat dalam proses elektoral di daerah sebagai kebutuhan strategi dakwah maupun sebagai korban tarik menarik kepentingan politik elit tertentu, atau keduanya. Muhammadiyah memainkan peran sebagai pemain politik sebagaimana partai politik dalam batas tertentu komunikasi politik, kandidasi, mobilisasi dukungan, dan pendidikan pemilih.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Civil Society

Menurut Hobbes, *civil society* yang identik dengan negara merupakan perwujudan dari kekuasaan absolut. *Civil society* hadir untuk meredam konflik agar tidak terjadi chaos dan tindakan anarki. *Civil society* berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga yang memiliki kekuasaan mutlak. Sedangkan menurut John Locke, *civil society* berfungsi untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu (Adi Suryadi Culla, 2006:44-45).

*Civil society* merupakan perkumpulan masyarakat politik yang taat kepada hukum, menjalin persaudaraan, toleransi, dan menjamin kebebasan beragama. Tidak hanya itu, *civil society* sebagai penegak demokrasi, penegakan terhadap hukum yang tidak adil dan melindungi apapun bentuk kekerasan. Dalam hal ini melaksanakan undang-undang dan melindungi setiap warga negara merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh siapa pun begitu

juga negara. Demi mewujudkan masyarakat yang berperadaban serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

## **2. Konsep Kekuatan Politik**

Kekuatan-kekuatan politik bisa masuk dalam pengertian individual maupun pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan disini kekuatan politik lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik (Miriam Budiardjo, 1998: 58).

## **3. Teori Elit**

Elite politik sebenarnya muncul dalam dunia sosiologi untuk membedakan satu komunitas dengan komunitas lain. Secara sederhana elit biasa diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat seperti elit agama, elit organisasi, namun dalam perspektif sosiologi elit lebih diartikan sebagai elit politik. Menurut David Jarry dan Julia Jerry yang dinyatakan oleh Syafruddin Jurdi menyatakan bahwa elit adalah sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting (Syarifuddin Jurdi, 2004: 19-20).

## **4. Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah nama dari organisasi (persyarikatan) Islam yang didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah menurut bahasa berarti umat Muhammad atau berasal dari nama Nabi Muhammad SAW. Dengan

mengambil nama Muhammad itu, persyarikatan Muhammadiyah bermaksud menghidupkan kembali ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta mengikuti jejaknya dalam beramal dan berjuang menegakkan kalimah Allah (Nashir, 2000:63).

## **5. Reformasi**

Reformasi politik adalah mengubah paradigma politik, cara kerja lembaga-lembaga politik yang ada sekarang, sekalipun mekanisme, proses dan cara pengambilan keputusannya sedemikian rupa sehingga apa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan dan memperkuat suara dan kepentingan serta hati nurani rakyat. Dalam rangka ini, mungkin saja diperlukan refungsionalisasi beberapa lembaga dan/atau aparat hukum tertentu, reorganisasi lembaga politik, ataupun restrukturalisasi.

## **6. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan tipe budaya politik yang merupakan isi yang ditransmisikan dalam sosialisasi politik untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik nasional. Partisipasi politik memiliki keikutsertaan warga negara yang biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut ataupun yang mempengaruhi hidupnya. Warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dapat dibagi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992: 140).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menemukan dan menginterpretasikan keterlibatan

kader Muhammadiyah dalam politik pada Era Reformasi di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. pemilihan lokasi sebagai kasus penelitian didasarkan bahwa Muhammadiyah sangat berkembang pesat di Kabupaten Soppeng dan melihat keterlibatan kadernya dalam politik.

## 3. Sumber data

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung melalui metode wawancara mendalam dan pengamatan langsung dari peneliti di kancah penelitian, untuk mewawancarai sejumlah informan yang terdiri dari informan kunci, informan ahli, dan informan biasa. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder peneliti dapatkan dari buku-buku yang ada di kantor PDM Muhammadiyah Soppeng dan perpustakaan daerah Kabupaten Soppeng.

## 4. Instrumen penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi: pedoman wawancara, catatan dokumentasi, kamera, video, dan alat perekam MP4.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan mengenai Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng pada Era Reformasi, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yakni kajian pustaka atau juga dikenal istilah *Library Research* dan tehnik wawancara atau dikenal dengan istilah *interview*. Sebagaimana dengan penulisan sejarah lainnya, dalam

penulisan penelitian inipun juga ditempuh empat tahapan dimana para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah yaitu “heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Politik Muhammadiyah pada Era Reformasi

Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil. Hubungan antara Muhammadiyah dan politik dari masa kemasa mengalami pasang surut sesuai dengan para elit dalam Muhammadiyah.

Garis kebijakan politik Muhammadiyah jika dikelompokkan berdasarkan perjalanan sejarahnya, bisa diklasifikasikan kedalam tiga model yaitu formal-langsung, personal-tidak langsung, dan netral. Pola hubungan Muhammadiyah dan politik tidak lepas dari peran-peran elite Muhammadiyah pada kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Netralisasi politik Muhammadiyah yang selama ini selalu menjadi ikon Muhammadiyah atau merupakan pilihan terbaik yang harus diambil oleh organisasi sosial keagamaan memiliki berbagai wujud dalam perjalanannya. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa netralitas hubungan politik dan Muhammadiyah terwujud kedalam tiga pola kehidupan.

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi: aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengembangkan misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasi agama Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini (Nilwani dalam Jurnal Tarbawi Khatulistiwa, 2016: 35).

Adapun khittah Denpasar tahun 2002 atau khittah Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara yang bersifat lengkap ini berisi sembilan butir pernyataan pokok sebagai mana yang dikemukakan Nilwana dalam jurnalnya “Kiprah Muhammadiyah dalam Kancan Politik Nasional” yaitu sebagai berikut:

1. Muhammadiyah menyakini bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam keduniawian yang harus selalu di motivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan dimana nilai-nilai ibadah melandasi dan dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian dan ketertiban, kebersamaan dan keadaan untuk terwujudnya “Baldatun Thayyiban Wa Rabbun Ghafur”.
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-

- benarnya
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.
  5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
  6. Muhammadiyah tidak berafiliasidan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
  7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
  8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam

politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan megedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.

9. Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan benegara kearah yang lebih baik, maju, demokratis dan bekeadaban.

## **2. Bentuk Keterlibatan Kader Muhammadiyah dalam kehidupan politik di Kabupaten Soppeng pada Era Reformasi 1998-2014**

Keterlibatan kader Muhammadiyah Kabupaten Soppeng dalam kehidupan politik pada masa reformasi dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai berikut:

### **a. Periode 1998-2004**

Periode ini merupakan periode awal keterlibatan kader Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng dalam bidang politik. Pada periode ini bentuk keterlibatan kadernya dalam politik yaitu pada pemilihan kepala desa di Timusu, tepatnya kecamatan Liriaja. Pada pemilihan kepala desa tahun 1998, salah satu calon yang terpilih yaitu Arisman, SH. Beliau adalah salah satu kader Muhammadiyah Ladjoa yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi kepala desa.

Salah seorang narasumber mengatakan bahwa terpilihnya Arisman menjadi kepala desa Timusu pada waktu itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di desa tersebut merupakan simpatisan Muhammadiyah. Hal inilah yang dianggap

menjadi titik kuat terpilihnya beliau menjadi kepala desa.

Selain Arisman, terdapat juga kader Muhammadiyah lainnya yang ikut terlibat dalam politik yaitu Muhammad Ahmad BA selaku ketua PDM Kabupaten Soppeng yang tercatat menjadi anggota DPR, Drs. H. Abdul Rahman Gessa selaku wakil ketua PDM Soppeng dan tercatat pernah menjadi anggota pengurus PAN di Kabupaten Soppeng, Abdul Latif Rahman selaku pengurus Majelis Tabligh Muhammadiyah dan juga tercatat pernah menjadi anggota pengurus PAN di Kabupaten Soppeng. Pada periode ini keterlibatan kader Muhammadiyah bahkan para elitnya dalam politik di karenakan pada awal terbentuknya PAN, kebanyakan inisiatornya berasal dari Muhammadiyah.

### **b. Periode 2004-2009**

Berbeda pada periode sebelumnya, pada periode ini keterlibatan kader Muhammadiyah dalam bidang politik sudah mulai melebarkan sayapnya. Selain menjadi anggota legislatif, beberapa kadernya juga sudah ada yang menjadi anggota dari partai-partai politik. Adapun kader-kader Muhammadiyah yang terlibat dalam politik yaitu, A. Kuneng sebagai wakil ketua DPD PAN Kabupaten Soppeng pada periode 2005-2010, beliau adalah kader Muhammadiyah cabang Watansoppeng. A. Mapparemma sebagai Ketua PDI P pada tahun 2006, beliau adalah kader Muhammadiyah cabang Watansoppeng. H. Mustang Djidde sebagai wakil DPC PAN 2005-2010, beliau adalah kader Muhammadiyah cabang Batu-batu. Selain ketiga kader Muhammadiyah tersebut, terdapat juga kader Aisyiyah yaitu Hj.A. Besse Megawati sebagai wakil pemberdayaan perempuan DPC PDIP Kabupaten Soppeng tahun 2007.

### **c. Periode 2009-2014**

Pada periode ini keterlibatan Muhammadiyah dalam politik semakin bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa kader Muhammadiyah dari periode sebelumnya yang kembali berpolitik pada periode ini

yaitu A. Kuneng, ia terpilih sebagai anggota DPRD tahun 2009-2014. Selain sebagai anggota DPRD, ia juga sebagai wakil ketua Banggar DPRD Kabupaten Soppeng periode 2009-2014, sebagai wakil ketua Bamus DPRD Kabupaten Soppeng periode 2009-2014 serta sebagai anggota MPP DPD PAN Soppeng 2010-2015. Yang kedua adalah A. Mapparemma ia juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng 2009-2014. Ketiga adalah Hj. A. Besse Megawati, ia juga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng 2009-2014.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai bendahara DPC PDIP Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 serta sebagai ketua kaukus perempuan politik Kabupaten Soppeng 2011-2014. Keempat adalah H. Mustang Djidde, ia juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng 2009-2014, selain sebagai anggota DPRD, ia juga sebagai wakil ketua DPD PAN Kabupaten Soppeng 2010-2014. Selain keempat kader tersebut, terdapat juga kader-kader yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu Asmawi yang merupakan kader Muhammadiyah cabang Ladjoa, A. MAhfud yang merupakan kader Muhammadiyah cabang Watansoppeng, Drs. Amiruddin Bakri yang merupakan kader Muhammadiyah cabang Marioriwawo. Haeruddin Tahang yang merupakan kader Muhammadiyah cabang Lilirilau.

### **3. Implikasi Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di Kabupaten Soppeng pada Era Reformasi 1998-2014**

Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam politik di Kabupaten Soppeng juga membawa beberapa perubahan yang terjadi dalam pemerintahan maupun dalam tubuh organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh H. Djamaluddin yang merupakan Dosen Al Gazali Soppeng. Beliau mengungkapkan bahwa dengan

adanya kader Muhammadiyah di legislatif itu akan memberikan aura positif di pemerintahan. Mereka akan memperbaiki politik kotor yang ada di pemerintahan, dengan bekal yang mereka punya dari Muhammadiyah itu dapat menjadi pegangan bagi mereka untuk memperbaiki segala yang ada di pemerintahan yang bertentangan dengan aturan-aturan maupun agama. (wawancara dengan bapak Djamaluddin pada tanggal 12 Oktober 2018).

Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam politik juga dapat kita lihat implikasinya yaitu dibentuknya forum kajian cinta Al Qur'an yang dibentuk pada tahun 2004 di Kabupaten Soppeng. Forum ini bekerjasama dengan anggota Aisyiyah yang ada di Kabupaten Soppeng. Dengan adanya forum ini tentu dikarenakan adanya kader Muhammadiyah di pemerintahan yang memperjuangkan untuk dapat bekerja sama dengan Aisyiyah. Setiap kajian cinta Al Qur'an melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang menjadi pelaksanaannya adalah Aisyiyah. (wawancara dengan Fachruddin Djulle pada tanggal 15 Oktober 2018).

Hal ini juga diungkapkan oleh kader-kader Muhammadiyah yang ada di pemerintahan salah satunya adalah A.Kuneng, beliau menyatakan bahwa :

“Dengan terlibatnya kader Muhammadiyah di pemerintahan, saya dan teman-teman lainnya berharap bisa membantu organisasi Muhammadiyah dalam menjalankan visi misinya khususnya di bidang politik, seumpamanya akan diadakan acara-acara perayaan di Soppeng saya sering mengajukan untuk diadakan pengajian maupun tabliq-tabliq akbar untuk memeriahkan acara-acara perayaan tersebut, hal ini supaya adanya rasa syukur kepada Sang Pencipta, kalau masalah diterima atau tidaknya itu urusan belakang, setidaknya sudah saya sampaikan” (wawancara



dengan A. Kuneng pada tanggal 24 Oktober 2018).

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Soppeng dan beberapa kader Muhammadiyah lainnya dapat digambarkan bahwa keterlibatan kadernya di politik memang memberikan pengaruh dalam tubuh organisasi itu sendiri. Hubungan Muhammadiyah dan pemerintahan relatif baik dalam arti kerjasama dibangun untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang saling mendukung dalam merealisasikan program-program Muhammadiyah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng

Hubungan ini terjadi dikarenakan adanya peran aktif kader Muhammadiyah dalam setiap proses kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara antara lain lobi-lobi individu, ikut serta dalam merumuskan dan mengimplementasi program, memberikan masukan dalam melancarkan kegiatan-kegiatan organisasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Simpulan**

1. Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikapnya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan itu harus diambil. Kebijakan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Soppeng selalu berdasarkan Khittah Muhammadiyah. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas dan pembingkai Muhammadiyah akan tetap berada di jalannya yang bergerak di dalam bidang dakwah dan tadjid di kalangan masyarakat, serta tidak bergerak dalam politik praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik. Tetapi dengan khittah itu Muhammadiyah dapat memainkan fungsi kelompok kepentingan atau

kekuatan moral dan proaktif dalam dinamika politik kebangsaan, dengan tetap pelaksanaannya berpijat pada prinsip-prinsip organisasi dan etika gerakan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

2. Bentuk keterlibatan kader Muhammadiyah di politik di Kabupaten Soppeng dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kader Muhammadiyah yang terpilih di legislatif. Pada masa reformasi (1998-2014) Muhammadiyah Kabupaten Soppeng mendukung penuh gelombang reformasi, menghendaki pemerintahan yang bersih, demokratis dan jujur. aspirasi warga Muhammadiyah disalurkan melalui wakil-wakilnya yang ada di legislatif. Dengan duduknya kader-kader Muhammadiyah di lembaga legislatif daerah Soppeng, masyarakat mengharapkan agar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat semakin maju. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya alokasi dana APBD yang ditujukan untuk dana pendidikan dan agama semakin mengalami kemajuan. Selain itu juga terjalinnya hubungan antara ulama serta tokoh masyarakat lain yang harmonis.
3. Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam politik di kabupaten Soppeng memang memberikan pengaruh dalam tubuh organisasi itu sendiri. Hubungan Muhammadiyah dan pemerintahan relatif baik dalam arti kerjasama dibangun untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang saling mendukung dalam merealisasikan program-program Muhammadiyah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng. Hubungan ini terjadi dikarenakan adanya peran aktif kader Muhammadiyah dalam setiap proses kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan

berbagai macam cara antara lain lobi-lobi individu, ikut serta dalam merumuskan dan mengimplementasi program, memberikan masukan bahkan sampai tahap mempengaruhi anggaran agar ada pos untuk Muhammadiyah dalam melancarkan kegiatan-kegiatan organisasi.

#### **b. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun pengurus organisasi Muhammadiyah Kabupaten Soppeng agar sekiranya memperhatikan data-data dan menjaga baik arsip sejarah yang ada di Kabupaten Soppeng, hal ini dikarenakan data-data tentang Muhammadiyah banyak yang hilang.
2. Kiranya generasi muda maupun yang tergabung dalam organisasi kepemudaan untuk selalu memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah akan pentingnya pemahaman agama didalam diri setiap masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah agar kiranya ilmu yang didapatkan dapat disampaikan maupun diajarkan kepada masyarakat maupun generasi muda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan cita-cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Jurdi, Syarifuddin. 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah sesudah Orde Baru*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press
- Mulkhan, Abdul Munir. 1990. *Warisan Intelektual K.H Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Percetakan Persatuan
- Nashir, Haedar. 2000. *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
- Nashir, Haedar. 2000. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
- Nilwani. 2016. Kiprah Muhammadiyah dalam Kancan Politik Nasional. *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa* Vol 2, No.2, (<http://www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id>, Diakses Februari 2016)
- Wahyudi, Andi. 1999. *Muhammadiyah dalam Gonjang Ganjing Politik*. Yogyakarta:Media Pressindo
- Yatim Riyanto, 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit, SIC: Surabaya.